

ANALISA KESELARASAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

M. Gasali, M¹, Syafrizal Thaher²

^{1,2} Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri

Email: Sali_mgm@yahoo.com(korespondensi)

Received : 23 Juni 2018 ; Accepted : 31 Juli 2018

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is the commitment of company to contribute in sustainable economic development which focused on balance among the concern of economic aspect, social and environment. The design of this research is qualitative to view the consistent of corporate CSR program which is operated in Kabupaten Indragiri Hilir through the government program on Sustainable Development Goals (SDGs). Based on this research, it can be concluded that the CSR of corporate which is operated in Indragiri Hilir supported the implementation of SDGs by 18 SDGs indicators including social pillar, economic pillar and environment pillar.

Keywords: SDGs, Mapping, goals, targets dan Indicators

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan demikian, CSR menjadi proporsi kerja perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, bisnis suatu perusahaan bisa saja berhenti, namun pembangunan harus terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang. Perusahaan memang tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, namun harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam upaya menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet) [1].

Pada akhir September 2015 di tingkat global yang bertempat Markas Besar PBB, para pemimpin 193 negara anggota PBB mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target-target universal yang transformatif, komprehensif dan berjangka jauh yang

dikenal dengan Agenda 2030. Agenda 2030 mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim sebagai tantangan utama di tingkat global, merupakan persyaratan mutlak untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Kesepakatan itu di namakan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini bertujuan memetakan program CSR yang telah mendukung pelaksanaan SDGs sehingga dapat dijadikan referensi bagi pengambil kebijakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Corporate Social Responsibility

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau menjelaskan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. sedangkan Program CSR adalah; comunity development, program kemitraan dan bina lingkungan, kemitraan usaha perkebunan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, dan sejenisnya

adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mitra binaan serta masyarakat dilingkungan perusahaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial dilingkungan Mitra binaan dan masyarakat sekitar perusahaan yang pada gilirannya dapat memberikan iklim kondusif bagi perusahaan [2].

Kewajiban pelaksanaan CSR oleh setiap badan usaha diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu khusus untuk BUMN di atur dalam Permen BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 yang mengamanatkan setiap BUMN untuk menjalankan program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan juga ditekankan untuk menjalankan program CSR yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara [3; 4; 5; 6; 7].

Penekanan kewajiban pelaksanaan program CSR juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanahkan setiap perusahaan yang beroperasi wajib menjalankan program CSR.

2.2. Definisi SDGs

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar untuk People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership atau yang dikenal dengan prinsip 5 P. People, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. Planet, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan

sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Prosperity, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Peace, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. Patnership, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (Means of Implementation). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut [8]:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman Berkelanjuta
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

2.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Beranjak dari pengalaman semua negara melaksanakan MDGs yang pencapaian target-target yang telah ditetapkan tidak optimal, disepakati perlunya penyempurnaan paradigma untuk kelanjutan MDGs menjadi SDGs.

SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh

Analisa Keselarasan Program.... (M. Gasali et al.)

bangsa di dunia. SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk

memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Analisa ini menggunakan analisa kualitatif untuk melihat keselarasan program CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir dengan program pemerintah Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini tidak menyebutkan nama-nama perusahaan yang melaksanakan program CSR tersebut. Dukumen yang dianalisa pada tahap ini yaitu

1. Laporan Kajian Analisa Potensi CSR tahun 2015 [9];
2. RAD SDGs Kab. Inhil 2017-2018 [10];
3. Jurnal dan Buku terkait CSR

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Analisa yang dilaksanakan, maka Program CSR yang selaras dengan SDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sebaran Pelaksanaan CSR yang selaras dengan Indikator SDGs

Indikator	Program CSR
1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Pembangunan Sumur bor untuk masyarakat.
1.5.1 (c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Bantuan pangan dan sandang bagi korban bencana
2.1.1 (a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Bantuan Penyediaan makanan tambahan bagi balita di Posyandu
3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan.	Pemeriksaan dan Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin

Indikator	Program CSR	Indikator	Program CSR
3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan Penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD dan Puskesmas 2. Bantuan Pembangunan gedung RSUD dan Puskesmas 3. Bantuan Penyediaan Ambulance di RSUD 		<p>laboratorium, komputer dan buku</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu
3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Melaksanakan Kegiatan kampanye pencegahan HIV/Aids	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Ruang Kelas, Toilet, dan taman bermain PAUD/TK 2. Bantuan Alat Peraga Edukatif dan buku
4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Ruang Kelas, Lapangan Olah raga dan Toilet, SD/MI/ sederajat 2. Bantuan Alat Peraga Edukatif, alat laboratorium, komputer dan buku 3. Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu 	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Pembangunan fasilitas sanitasi bagi masyarakat (pada umumnya pasti dilengkapi dengan penyediaan sumur bor)
4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Ruang Kelas, Lapangan Olah raga dan Toilet, SMP/MTs/ sederajat 2. Bantuan Alat Peraga Edukatif, alat laboratorium, komputer dan buku 3. Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu 	7.1.1* Rasio elektrifikasi.	Penyediaan aliran listrik gratis atau bersubsidi bagi masyarakat disekitar operasional perusahaan
4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Gedung Ruang Kelas, Lapangan Olah raga dan Toilet, SMA/ sederajat 2. Bantuan Alat Peraga Edukatif, alat laboratorium, komputer dan buku 3. Beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu 	8.1.1. (a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Pembangunan Pasar, Los Pasar, Gerobak Pedagang dan Tenda pedagang
		9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.	Pembangunan dan renovasi jalan dan jembatan umum (bukan jalan milik perusahaan)
		9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.	Pembangunan dermaga untuk fasilitas umum dan dermaga fasilitas kesehatan
		11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Penyediaan tong sampah pilah di pusat keramaian dan fasilitas umum
		11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Penghijauan kota seperti penanaman RTH dan jalan raya.
		15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan	reboisasi hutan mangrove

Indikator	Program CSR
keseluruhan.	

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Tim Koordinasi SDGs berupa Surat Keputusan Bupati nomor kpts.362/VI/HK-2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat TPB/SDGs Kabupaten Indragiri Hilir. Seluruh Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir baik Industri Manufaktur maupun Industri Jasa diamanahkan menjadi anggota tim ini. Berdasarkan analisa dalam penelitian ini program CSR selaras dengan 18 Indikator SDGs meliputi Pilar Sosial, Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan.

5. KESIMPULAN

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target dan 241 Indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan analisa dalam penelitian ini program CSR selaras dengan 18 Indikator SDGs meliputi Pilar Sosial, Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Roberta Zulfhi Surya, ST., MT yang telah memfasilitasi penulisan makalah ini dan melaksanakan knowledge sharing terkait SDGs
2. Bapak Drs. H. Erwin, SE., M.E., M.Si selaku Ketua Sekretariat SDGs Kabupaten Indragiri Hilir
3. Ibu Tuti Rahmawati, SP., M.KM., M.Med.Sc anggota Sekretariat SDGs Provinsi Riau

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Susanti, H.D. Alternatif model extended producer responsibility (EPR) pada pengelolaan limbah hasil

industri pengalengan ikan dengan konsep green manufacturing dan Corporate social responsibility. Unpublish [Disertasi]. Program Studi Doktor Teknik Mesin (Konsentrasi Teknik Industri) Universitas Brawijaya Malang, 2010

- [2] Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- [4] Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara
- [5] Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- [6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- [8] R.Z. Surya. Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Rencana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Selodang Mayang, Vo.l 10, No. 1, 2018
- [9] Bappeda Inhil dan Lemlit UIR. Analisis Potensi CSR dalam Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Unpublish [Laporan Kajian], 2015
- [10] UNDP, Metadata SDGs, 2017
- [11] Bappeda Inhil, Rencana Aksi Daerah SDGs Kab. Inhil 2017 – 2018 (support by UNDP). [Dokumen Daerah], 2017